

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN DAN
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
APARAT PEMERINTAH DAERAH**
(*Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar*)

Oleh:

Haryanti Ismalia

Pembimbing: Taufeni Taufik dan Rheny Afriana Hanif

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: Haryanti.ismalia01@gmail.com

*The characteristics influence of budget objectives and internal
control to performance of local government officials
(Emprical Study on the Kampar District SKPD)*

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of empirical evidence budgetary participation, budget goal clarity, feedback, evaluation of the budget, the budget goal difficulty, and internal control over the performance of local government officials Kampar regency. This research was conducted by using a survey of local work unit Kampar regency. The population in this study is 31 working units Kampar regency. Samples taken amounted to 93 respondents. The type of data used are primary data with data collection method using a questionnaire. Data analysis method used in this study. The results showed that the Budget Participation significant effect on the performance of local government officials. Clarity of purpose budget has no significant effect on the performance of local government officials. Umpan behind budget significantly affect the performance of local government officials. Evaluation budget significantly affect the performance of local government officials. Difficulty budgetary purposes does not affect the performance of local government officials and Internal Control influence on the performance of local government officials . Based on the calculation of the coefficient of determination (R²) obtained a value of 0.717. This shows that the influence of the independent variables on the dependent 71.7% and the remaining 28.3% influenced by other variables.

Keywords : Characteristic, budget, internal control, performance and government.

PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim

demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran ru-

tin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin membengkak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pengukuran tingkat kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan dalam menyerap anggaran.

Penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka aparat pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga diharapkan aparat pemerintah dapat melaksanakan anggaran yang lebih baik dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja aparat pemerintah(Munawar,2006)

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya(Munawar,2006)

Umpan balik anggaran sebagai karakteristik lain memiliki maksud bahwa adanya komunikasi informasi mengenai rencana dan hasil yang dicapai. Secara formal umpan balik ini diwujudkan dalam laporan prestasi kerja. Laporan prestasi kerja umumnya disampaikan segera setelah pelaksanaan berakhir, dengan maksud agar aparat pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan yang sama(Munawar,2006)

Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka(Munawar,2006).

Kesulitan tujuan anggaran menggambarkan adanya rentang sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai dengan sangat ketat dan tidak dapat dicapai (kennis, 1979 dalam Trisnawati, 2000). Dampak tingkat kesulitan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan implikasi bahwa apabila manajer merasa anggaran yang ditetapkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan tidak mudah dicapai maka hal tersebut menurunkan kinerja manajer karna merasa gagal dan frustrasi sebelum mencapainya. Sedangkan apabila anggaran yang ditetapkan terlalu longgar dan mudah untuk dicapai maka manajer merasa tidak termotivasi dalam melaksanakannya karna untuk mencapainya tidak diperlukan usaha yang keras sehingga tidak menimbulkan suatu tantangan.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketepatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasinya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Kampar TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Kampar pada tahun-tahun sebelumnya. Namun ditemukan permasalahan yang terkait kelemahan sistem pengendalian internal diantaranya adalah (1) Penganggaran Belanja Modal Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan Keuangan; (2) Nilai Persediaan yang Disajikan pada Neraca Per 31 Desember 2012 Belum Menggambarkan Seluruh Saldo Persediaan; (3) Penyajian Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PD Kampar Aneka Karya, PDAM Tirta Kampar dan BMT Tidak Berdasarkan Dokumen Sumber Yang Memadai; dan (4) Penatausahaan Aset Tetap Seluruh SKPD Tidak Memadai, sehingga Nilai Aset Tetap pada Neraca Per 31 Desember 2012 Tidak Dapat Dinyakini Kewajarannya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Kampar belum bisa dikatakan baik. Jadi, saya merasa perlu untuk melakukan penelitian ini di kabupaten Kampar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mia Milayanti (2012) dengan judul yang sama dan menambahkan satu variabel pengendalian internal namun lokasi penelitian yang berbeda. Penulis tertarik melakukan penelitian ini di Kabupaten Kampar dikarenakan belum ada ditemukan penelitian yang sama untuk daerah Kabupaten Kampar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah faktor Karakteristik tujuan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD kabupaten Kampar)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh faktor Karakteristik tujuan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD kabupaten Kampar)

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur yang memiliki kemampuan pelaksanaan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan mendasarkan pada etika profesi, mengembangkan kemampuan pengendalian diri (*self control*) dan berorientasi pada kualitas kinerja dengan cara kerja yang efisien, efektif dan ekonomis memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat dan masalah - masalah masyarakat serta melaksanakan kewajiban memberikan pertanggung-jawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan (Surjadi, 2009:36).

Karakteristik Tujuan Anggaran

Karakteristik anggaran merupakan determinan utama yang melekat pada sistem anggaran dapat diterima untuk berbagai pelaksanaan anggaran. Salah satu maksud yang terkandung dalam karakteristik anggaran merupakan upaya untuk meningkatkan keberadaan anggaran menjadi lebih akurat, sehingga pengendalian yang akan dilakukan dapat lebih terkendali (Bastian, 2006:166)

Partisipasi Anggaran

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki

dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja (Ikhsan dan Ishak, 2005 :173)

Kejelasan Tujuan Anggaran

Kejelasan tujuan anggaran berhubungan dengan sejauh mana tujuan-tujuan anggaran dinyatakan secara khusus dan jelas serta di-pahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab memenuhinya. Dengan adanya kejelasan tujuan, dapat diinformasikan kepada manajer level bawah tentang apa yang diharapkan oleh manajer yang lebih tinggi. Sebaliknya, manajer yang lebih tinggi dapat mempelajari dukungan-dukungan dan persoalan-persoalan manajer dibawahnya melalui laporan-laporan dari bawah (Arifin, 2007 : 26).

Umpan balik Anggaran

Umpan balik merupakan salah satu persyaratan yang cukup penting dalam proses pengendalian pelaksanaan suatu kegiatan. Umpan balik juga dapat mendorong motivasi pelaksanaan anggaran berikutnya, umpan balik anggaran dapat menunjukkan sejauh mana sasaran anggaran telah dicapai. Umpan balik memiliki dua fungsi bagi orang-orang yang menerimanya, yang pertama berkaitan dengan instruksi dan kedua adalah berkaitan dengan motivasi. Dengan adanya umpan balik yang diperoleh dari pencapaian sasaran anggaran dan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan,

maka aparat pemerintah termotivasi dalam meningkatkan kinerja untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran (Murthi dan Sujana, 2008).

Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi.

Kesulitan tujuan anggaran

Kesulitan tujuan anggaran mencakup berbagai kendala dan kesulitan yang dirasakan para aparat pemerintah daerah untuk mencapai tujuan anggaran pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kesulitan anggaran memang dapat diantisipasi melalui proses penyusunan anggaran partisipatif. Namun, penerapan anggaran partisipatif akan efektif meminimalisasi kesulitan pencapaian anggaran jika kondisinya normal sesuai dengan yang di prediksi. Perubahan /fluktuasi lingkungan akan menjadikan anggaran partisipatif kurang efektif (Alim, 2003).

Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui ke-

giatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (PP no 60 tahun 2008)

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Partisipasi dapat meningkatkan kinerja karena partisipasi memungkinkan bawahan mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan kepada atasannya dan partisipasi dapat memungkinkan bawahan untuk memilih tindakan yang dapat membangun komitmen dan dianggap sebagai tanggung jawab atas apa yang telah dipilih. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka aparat pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga diharapkan aparat pemerintah dapat melaksanakan anggaran yang lebih baik dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja aparat pemerintah. (Puspaningsih 2002).

Hasil penelitian Munawar (2006), Istiyani (2009) menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Erwati (2009) juga menemukan bahwa partisipasi penyusunan Anggaran berbasis Kinerja (ABK) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kepala SKPD Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan

ABK, maka akan semakin meningkatkan kinerja kepala SKPD Pemerintah Daerah. Semakin tinggi tingkat keterlibatan para aparatur dalam proses penyusunan anggaran, maka semakin baik pula hasil kerjanya.

H1: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, kejelasan anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan peran aparat pemerintah dalam penyusunan sasaran anggaran dengan harapan kinerja aparat pemerintah akan meningkat (Brownell, 1982 dalam Rosalia Dwi Fadma (2005).

Penelitian Munawar (2006) didukung oleh Penelitian Istiyani (2009) yang menunjukkan bahwa variabel kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap variabel kinerja aparat Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kinerja aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja aparat Pemerintah Daerah juga akan turun.

H2 : Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Umpan balik anggaran sebagai karakteristik lain memiliki maksud bahwa adanya komunikasi informasi mengenai rencana dan hasil yang dicapai. Secara formal umpan balik ini diwujudkan dalam laporan prestasi kerja. Laporan prestasi kerja umumnya disampaikan segera setelah pelaksanaan berakhir, dengan maksud agar aparat pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan yang sama. Umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi umpan balik yang diterima aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, sebaliknya jika umpan balik anggaran yang sedikit maka akan melemahkan dan menurunkan kinerja aparat pemerintah daerah (Istiyani,2009).

Menurut Istiyani (2009) Bahwa variabel umpan balik anggaran berpengaruh terhadap variabel kinerja aparat Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima aparat Pemerintah Daerah, maka semakin tinggi kinerja aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika umpan balik anggaran yang sedikit akan melemahkan kinerja dan kinerja aparat Pemerintah Daerah juga akan turun.

H₃ : Umpan balik anggaran berpengaruh terhadap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Evaluasi anggaran bukan saja untuk mengetahui sebagaimana keberhasilan pelaksanaan, akan tetapi lebih jauh dari itu, hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah di programkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja akan menjadi lebih baik(Wulandari,2010).

Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah di programkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik.

H₄ : Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah daerah.

Kesulitan sasaran anggaran menggambarkan adanya rentang sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai dengan sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Dampak tingkat kesulitan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan implikasi bahwa apabila manajer merasa ang-

garan yang ditetapkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan tidak mudah dicapai maka hal tersebut menurunkan kinerja manajer karna merasa gagal dan frustrasi sebelum mencapainya. Sedangkan apabila anggaran yang ditetapkan terlalu longgar dan mudah untuk dicapai maka manajer merasa tidak termotivasi dalam melaksanakannya karna untuk mencapainya tidak diperlukan usaha yang keras sehingga tidak menimbulkan suatu tantangan dan akan menurunkan kinerja pegawainya. (kennis, 1979 dalam Trisnawati, 2000).

Kholmi dan Milayanti (2012) menemukan bahwa kesulitan pencapaian tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah Palangka Raya

H₅ : Kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

System pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP No. 60 tahun 2008). Yang dimaksud dengan tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus adalah pengawasan dan pemeriksaan dapat seperti menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan akan meningkatkan kinerja individu orga-

nisasi dalam melakukan pekerjaannya.

Variabel ini sebelumnya sudah diteliti oleh Prasetyo dan Kompyurini (2007) membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.

H₆ : pengendalian internal berpengaruh terhadap terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar, yang berjumlah 31 SKPD. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kampar yang menjabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Kabag keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga responden keseluruhan berjumlah 93 orang.

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pengumpulan data primer, yaitu kuisisioner. Kuisisioner yang telah terstruktur dibagi secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuisisioner terdiri dari 93 buah akan dibagikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Masing-masing SKPD mendapat 3 buah kuisisioner yang ditujukan kepada kepala bagian umum dan kepegawaian serta kepala bagian keuangan di SKPD

Satistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non parametrik dimana dengan meng-

gunakan skala pengukuran ordinal. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut.

Pengujian Data

Uji Validitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas alat ukur *internal consistency*, dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh di analisis dengan teknik tertentu (Siregar, 2013). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Alpha Cronbach (a)*. *Alpha Cronbach* digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah keduanya berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *normal probability plot (P Plot)*.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2009:95). Deteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolinieritas jika besar nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas (Ghozali, 2009-:125).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2005). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Menurut Purwanto (2008) regresi berganda adalah banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk

mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis pertama kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam menggunakan koefisien korelasi yang dapat dilihat dalam persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009: 87).

Pengujian Hipotesis

Hipotesis satu, dua, tiga, empat, lima dan enam akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, kesulitan tujuan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. dengan tingkat keyakinan 95% dan uji tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5%. Kriterianya adalah apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan sebaliknya apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Kampar merupakan Ibu Kota Bangkinang, Dengan disahkan undang-undang Nomor 12 tahun 1956, maka mulai tanggal 16 juni 1967 resmilah bangkinang sebagai ibu kota Kabupaten Kampar mulai berpacu mengejar segala bentuk keteringgalan dan keterbelakangan yang selama ini menyelimuti segala sektor kehidupan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian seperti kinerja aparat pemerintah daerah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi tujuan anggaran, kesulitan tujuan anggaran dan pengendalian interna. Statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	81	21.00	40.00	29.7037	4.70225
Partisipasi Anggaran	81	12.00	25.00	18.6049	3.62174
Kejelasan Tujuan Anggaran	81	11.00	20.00	15.2222	2.32916
Umpan Balik	81	7.00	15.00	11.0123	2.14764
Evaluasi Anggaran	81	11.00	20.00	14.1358	2.41740

Kesulitan Tujuan Anggaran	81	11.00	20.00	14.2346	2.34132
Pengendalian Intern	81	66.00	110.00	86.4568	13.15489

Sumber : Data Hasil Olahan,2015

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa kinerja aparat pemerintah daerah mempunyai nilai minimum 21,00 dan nilai maksimum 40,00. Mean 29,7037 dengan standar deviasi 4,70225. Partisipasi anggaran mempunyai nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 25,00. Mean 18,6049 dengan standar deviasi 3,62174. Kejelasan tujuan anggaran mempunyai nilai minimum 11,00 dan nilai maksimum 20,00. Mean 15,2222 dengan standar deviasi 2,32911. Umpan balik anggaran mempunyai nilai minimum 7,00 dan nilai maksimum 15,00. Mean 11,012 dengan standar deviasi 2,1476. Evaluasi anggaran mempunyai nilai minimum 11,00 dan nilai maksimum 20,00. Mean 14,1358 dengan standar deviasi 2,41740. Kesulitan tujuan anggaran mempunyai nilai minimum 11,00 dan nilai maksimum 20,00. Mean 14,2346 dengan standar deviasi 2,34132. Pengendalian internal mempunyai nilai minimum 66,00 dan nilai maksimum 110,00. Mean 86,4568 dengan standar deviasi 13,15489.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan SPSS 17.0, terlihat bahwa data tersebar dise-kitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persya-ratan normalitas data dapat ter-penuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

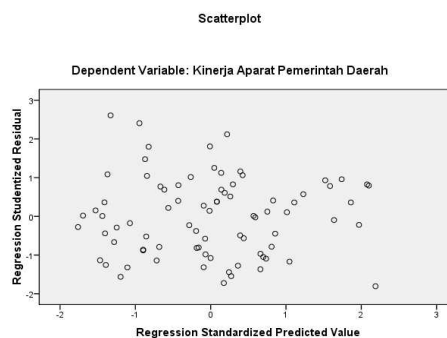
Hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap

variabel inde-pendennya memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inde-penden tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas

Gambar 1
Hasil uji Heterokedastisitas



Sumber: Olahan Data SPSS

Berdasarkan gambar diatas dari hasil uji heteroskedastisitas, terlihat ba-hwa data tersebar dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroske-dastisitas.

Hasil uji Autokorelasi

Dari hasil uji autokorelasi, diperoleh angka DW sebesar 1,794, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari pe-nelitian ini bebas dari autokorelasi, karena angka DW berada diantara -2 sampai +2.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 1,555 + 0,296 X_1 + 0,166 X_2 + 0,483 X_3 + 0,360 X_4 + 0,162 X_5 + 0,086X_6 + e$$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi diketahui R Square sebesar 0,717. Angka ini menjelaskan bahwa 71,7% partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, kesulitan tujuan anggaran dan pengendalian internal dipengaruhi oleh kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan sisanya 28,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini seperti komitmen organisasi, Akuntabilitas publik, budaya organisasi *balanced score-card* dan prinsip-prinsip *good governance*

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_1 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,515 > 1,993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Artinya dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka aparat pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung

jawab dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Istiyani (2009) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja aparat Pemda.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_2 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 1,103 > 1,993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,274 yang lebih besar dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a ditolak dan H_o diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan tujuan anggaran yang ada pada aparat pemerintah daerah di kabupaten kampar tidak berpengaruh menunjukkan adanya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah ada tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik, jelas dan dipahami aparat Pemerintah daerah Kabupaten Kampar, namun tidak serta merta meningkatkan kinerja mereka. Kondisi ini dimungkinkan karena proses penyusunan anggaran tidak partisipatif sehingga dapat berpengaruh pada penetapan tujuan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kholmi dan Milayanti (2012) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel sikap aparat dalam menilai kinerja Pemda, ini bahwa jelasnya tujuan anggaran tidak menjamin me-

tingkatnya kinerja aparat Pemda kota Palangka Raya.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_3 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,377 > 1,993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan Bahwa variabel Umpan balik berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Artinya bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima aparat pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryanti (2002) dalam Wulandari (2010) menemukan bahwa umpan balik anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Hal ini ditunjukkan oleh aparat pemerintah daerah NTT yang mengetahui hasil usahanya dalam menyusun anggaran maupun dalam melaksanakan anggaran sehingga membuat mereka merasa sukses.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_4 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,068 > 1,993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,042 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan Bahwa variabel Evaluasi anggaran

berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja mereka lebih baik. Sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima.

Hasil temuan penelitian Wulandari (2010) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah kota pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah di programkan dan pada pelaksanaan anggaran.

Hasil Pengujian Hipotesis Kelima

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_5 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 0,856 > 1,993$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,395 yang lebih besar dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a ditolak dan H_o diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan Bahwa variabel kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya semakin tinggi kesulitan tujuan anggaran yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah semakin susah untuk mencapai kinerja aparat pemerintah daerah yang ingin dituju dan sebaliknya jika terlalu rendah kesulitan yang dihadapi aparat daerah tersebut mereka tidak merasa tertantang untuk mencapai hasilnya. Sehingga hipotesis kelima (H_5) ditolak

Hal ini berarti bahwa kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kampar tidak dipengaruhi oleh kesu-

litan tujuan anggaran karena pada pemerintah Kampar telah disesuaikan menurut pengeluaran dan target yang dicapai, pada pemerintah daerah Kampar tidak adanya batasan yang menyatakan bahwa anggaran yang sangat longgar atau terlalu longgar. Biasanya perusahaan swasta yang memberlakukan rentang dari sangat longgar dan mudah tercapai sama dengan sangat ketat dan tidak dapat tercapai.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Kholmi dan Milayanti (2012) bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif pada variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel sikap aparat dalam menilai kinerja Pemda, ini bahwa jelasnya tujuan anggaran tidak menjamin meningkatnya kinerja aparat Pemda kota Palangka Raya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2010) bahwa kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Keenam

Berdasarkan hasil perhitungan, maka hasil pengujian untuk H_6 diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,187 > 1,993$ dengan nilai signifikan sebesar 0,032 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan Bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya dengan pengendalian intern yang baik di aparat pemerintah daerah tersebut bisa meningkatkan kualitas dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Sehingga hipotesis keenam (H_6) diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ira amelia (2014) menunjukkan hasil bahwa Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja daerah Kabupaten Pelalawan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Partisipasi anggaran berpengaruh yang terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kampar.
2. Kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kampar.
3. Umpan Balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kampar
4. Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kampar
5. Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kampar.
6. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kampar.

Keterbatasan

1. Dalam penelitian ini, penggunaan kuisisioner sebagian besar masih menggunakan kuisisioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengukurannya karena

belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.

2. Penelitian ini hanya menggunakan obyek penelitian satuan kerja perangkat daerah dalam satu daerah sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan pengendalian internal terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kampar.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan.
2. Pimpinan SKPD harus mulai membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kinerja aparat pemerintah daerah.
3. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah,
4. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih

memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2007. Pengaruh Karakteristik Gaya Penyusunan Anggaran Terhadap Efisiensi Biaya. *Sinergi, Kajian Bisnis dan Manajemen*. ISSN : 1410-9018, Volume 9. No 1, Januari 2007 hal. 23-35.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Erwati, Misni 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Kepala SKPD Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating (Survey pada aparat pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Maksi*, ISSN : 0854-8986, Volume 102.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*.
- Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tamanggung). Tesis Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat.

- Kenis, Izzetin. 2012. *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review. Vol. LIV No.4.October.pp. 707-721
- Kholmi, dkk.2012. Pengaruh *Budgetary Goal Characteristic* terhadap Sikap Aparat Dalam Menilai Kinerja aparat pemerintah daerah; Studi pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , ISSN : 2088-0685, volume 2 : 243-250
- Munawar,2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku,Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi 9 Pa-dang. K-ASSP 02.
- Murthi, dkk. 2006. Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Denpasar. Tesis Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar. (Tidak dipublikasikan).
- Puspaningsih, Abriyani. 2002. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Manajerial .
- Puspaningsih, Abriyani. 2002. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Manajerial . JAAI Volume 6, No. 2. Volume 6, No. 2.
- Prasetyono dan Kompyurini Nurul.2007. Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Simposium Nasional Akuntansi. IAI. Makassar.
- Ramandai, Pilipus. 2010. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. Jurnal Maksi, volume 10:55-73.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (diakses pada 29 September 2014)